**KENAIKAN TUNJANGAN HAKIM SEBAGAI BENTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(**Studi Kasus Pengadilan Negeri Manado**)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh :

Baihaqie Uno

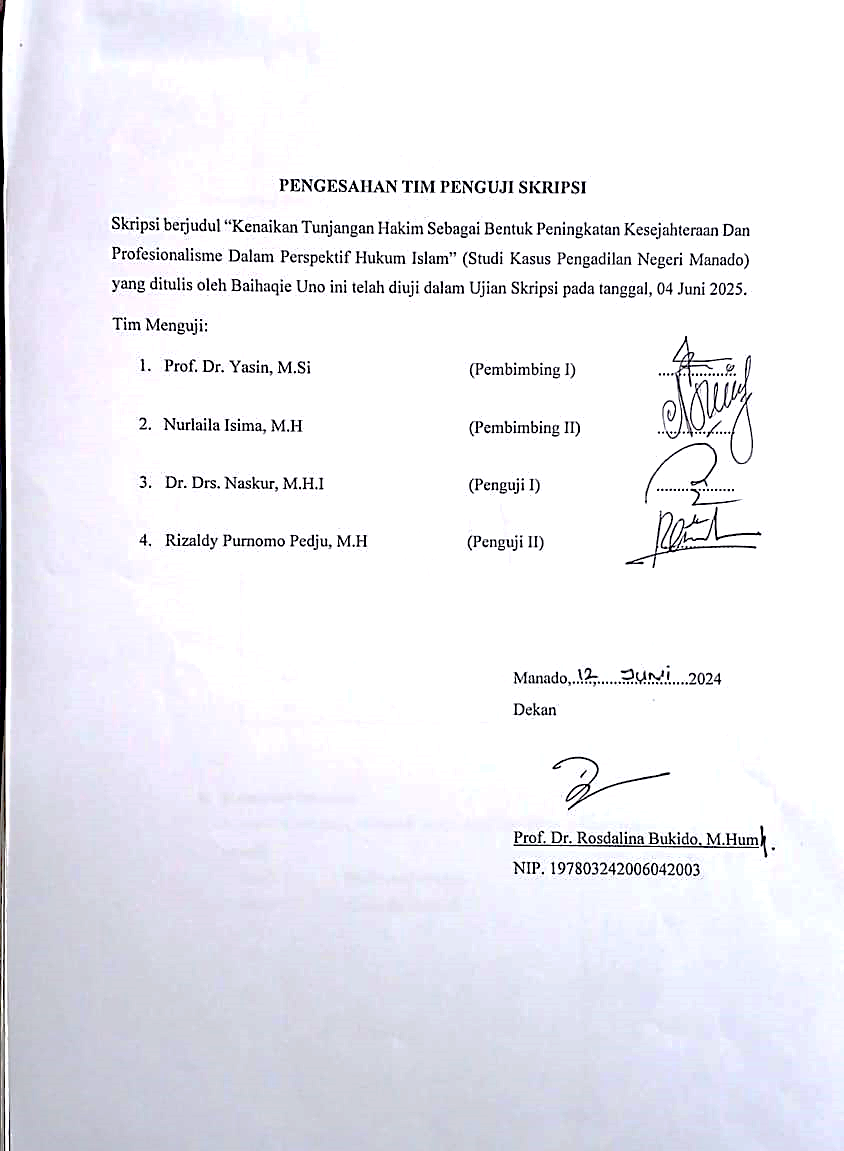
NIM. 20212056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**2025 M / 1446 H**



# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

## Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum, Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang otonom, menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, negara yang berkeadilan. Hakim merupakan salah satu alat negara untuk menegakkan supremasi hukum. Hakim harus bebas, tidak memihak, dan tidak terpengaruh dalam menjalankan tugasnya.

Hakim memiliki sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal memberikan putusan yang diajukan pada proses pengadilan. Dengan menelaah dalil-dalil serta dokumen pendukung yang dihadirkan dari kedua belah pihak pada proses persidangan baik itu. Hakim harus bersikap netral, independen, dan tidak memihak kepada para pihak yang sedang bersengketa, serta putusannya harus adil dan berdasarkan hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini merupakan kewajiban konstitusional, khususnya karena Indonesia adalah negara hukum.

Terwujudnya negara hukum sangat dibantu oleh hakim, yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sebagai landasan nilai-nilai negara hukum, status dan kesejahteraan mereka harus dijamin untuk mewujudkan keadilan.[[1]](#footnote-1)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mutu putusan di lembaga peradilan, peningkatan tunjangan hakim menjadi hal yang sangat penting. Menegakkan keadilan dan kebenaran merupakan tugas utama hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman..

Karena hakim dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum *(ius curia novit),* putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang cukup agar para pihak dalam kasus tersebut, forum ilmiah, dan masyarakat umum dapat menerimanya secara rasional. Hakim harus berhati-hati untuk memastikan bahwa putusannya konsisten dengan prinsip-prinsip ilmu hukum.

Ketika seseorang diadili, hakim harus terbuka terhadap fakta dan kritik yang membangun serta tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan emosi semata harus sesuai sesuai dengan yang ada dalam persidangan. Keadaan, fakta, dan peristiwa tindak pidana, latar belakang terdakwa, akibat hukuman, serta nilai-nilai kehidupan (etika/norma kesopanan dan agama) yang berlaku di masyarakat harus dipertimbangkan dan dipahami secara seksama oleh hakim.[[2]](#footnote-2)

Pelaku utama dalam membangun sistem hukum yang efisien adalah hakim. Masyarakat dapat membangun lingkungan sosial yang stabil dan adil dengan memperoleh kejelasan dan keyakinan hukum melalui sistem peradilan yang efektif. Oleh karena itu, setiap negara harus terus meningkatkan sistem peradilannya dan pengembangannya harus terus diperhatikan, terutama dengan meningkatkan karakter moral personal penegak hukum agar seluruh elemen masyarakat selalu mempercayai sitem peradilan yang ada di Negara ini.

Mengingat kesejahteraan hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan integritas dalam menjalankan tugasnya, maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim harus mempertimbangkan hal ini. Ada kemungkinan tekanan dari luar dan ketidakstabilan mental dan intelektual jika kesejahteraan hakim tidak memadai. Selain itu, kesejahteraan hakim dapat mengganggu kinerja hakim dan membahayakan mutu putusan yang diberikan. Dengan penyesuaian kesejahteraan hakim, diharapkan asas nondiskriminasi dan tercapainya keadilan yang bermutu dapat diselaraskan. Dalam hal ini, landasan untuk menjamin keadilan yang bermutu adalah sistem hukum yang terbuka dan bertanggung jawab. Sistem peradilan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan dengan menegakkan asas persamaan bagi semua melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Dalam perspektif hukum islam, kesejahteraan dan keadilan merupak an nilai-nilai yang fundamental yang harus di junjung tinggi. Alquran menekankan pentingnya keadilan dalam Q.S An-Nisa ayat 135, sebagai berikut;

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوَّامِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوۡ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ‌ ؕ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا‌ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰٓى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ‌ۚ وَاِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” ( Q.S An-Nisa ayat 135).[[3]](#footnote-3)

Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada semua orang dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu abaikan kenyataan bahwa kamu adalah saksi yang setia karena Allah atau bahwa kamu mendiskriminasi orang-orang yang kamu sayangi, seperti orang tua atau saudara-saudaramu, untuk menghalangimu menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Allah adalah satu-satunya yang paling memahami keuntungan atau kebaikan terdakwa, jadi jika dia kaya, jangan biarkan hal itu memengaruhimu, dan jika dia melarat, janganlah merasa kasihan kepadanya. Oleh karena itu, lawanlah keinginan untuk menyimpang dari kebenaran untuk membuat keputusan yang tidak adil dan berubah menjadi saksi palsu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat teliti dalam segala hal yang kamu lakukan, termasuk setiap pilihan yang kamu buat dan setiap kesaksian yang kamu berikan, bahkan jika kamu memalsukan fakta dan pernyataan atau tidak mau menjadi saksi yang jujur ​​yang berbicara dan mempertahankan kebenaran..

Adapun hadist yang membahas tentang seorang hakim dalam berwenang sebagai berikut : Rasulullah saw mewanti-wanti umatnya yang menjadi seorang hakim, bahwa profesi tersebut bukan sembarang profesi, beliau menggambarkan seseorang yang menjadi hakim seolah dibunuh tanpa menggunakan pisau. Beliau bersabda:

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

Artinya:

“Siapapun yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau.” (HR At-Tirmidzi).

Al-Munawi menjelaskan, seorang yang menerima kewenangan untuk menjadi seorang hakim artinya dia telah menyiksa dirinya sendiri dengan rasa sakit yang serupa dengan disembelih tanpa pisau. Siksaan tersebut didapat melalui kesulitan-kesulitan yang ada dalam birokrat pemerintahan.[[4]](#footnote-4)

Hakim merupakan penengah utama putusan suatu perkara dalam sistem hukum Indonesia. Menurut etimologinya, hakim adalah orang yang membuat keputusan hukum. Komponen utama pengadilan adalah hakim. Ia sebenarnya sama persis dengan pengadilan. Hakim merupakan satu-satunya pembuat keputusan dalam sistem peradilan Indonesia, dan untuk menegakkan hukum, putusannya harus seadil-adilnya.

Hakim harus tetap bersikap tidak memihak dan tidak membiarkan pihak mana pun memengaruhi putusannya. Putusan pengadilan sering disamakan dengan putusan hakim, dan kebebasan kekuasaan kehakiman sering dikaitkan dengan kebebasan hakim. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka hal ini cukup metodis agar negara senantiasa berlandaskan pada konstitusi dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Hakim juga merupakan perwujudan sistem peradilan Indonesia yang berfungsi sebagai juru bicara pemerintah dan mengemban tugas yang sangat luas.

Hakim tidak hanya harus memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga moral yang baik, kejujuran, dan kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat tampil di hadapan publik sebagai pihak yang berwenang memutus perkara. Pengadilan yang merupakan pilar utama penegakan hukum melalui peran hakim sebagai pelaku utama harus menjunjung tinggi integritas, mengembangkan kepekaan hati nurani, dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang optimal. Hakim yang melaksanakan kewenangan penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutus suatu perkara, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada para pihak yang terkait (dalam hal ini kepada kemanusiaan).

Untuk pelaksanaan tugasnya, hakim harus meninjau dan memberikan perhatian yang memadai terhadap putusan yang baik. Dalam situasi ini, diperlukan proses penalaran hukum yang juga dikenal sebagai *legal reasoning*. Dalam konteks ini, *legal Reasoning* mengacu pada pencarian "alasan" dalam kaitannya dengan hukum atau landasan yang menjadi dasar hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara yang diajukan kepadanya. [[5]](#footnote-5)

Setelah mengetahui definisi dari hakim maka kembali terhadap fokus penelitian ini yaitu terkait dengan kenaikan tunjangan dari seorang hakim apakah hal tersebut bisa menjadi bentuk peningkatan kesejahteraan serta profesionalisme para hakim, pada beberapa waktu yang lalu Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memberikan kepastian bahwa terakit aksi cuti secara serentak atau pemberhentian dalam bekerja yang dilakukan dari tanggal 7 sampai 11 Oktober kemarin telah selesai serta tidak akan dilanjutkan. SHI mengeluarkan *statement* terkait pelaksanaan aksi cuti bersama tersebut, yaitu pada saat proses pelaksanaannya diseluruh wilayah, telah dlaksanakan sejumlah audiensi dengan berbagai pihak. SHI menegaskan, semua pihak termasuk pemerintah telah menanggapi positif dan menerima tuntutan hakim terkait kenaikan gaji dan tunjangan yang layak.

SHI menyatakan akan memantau komitmen yang dibuat oleh semua pihak yang terlibat dalam pertemuan dan audiensi kemarin hingga aksi cuti bersama selesai. Demi mewujudkan independensi lembaga peradilan Indonesia, SHI lebih lanjut menjamin akan menepati komitmennya untuk menjaga integritas pribadi hakim dan lembaga. SHI menekankan bahwa setelah aksi cuti bersama dihentikan, tuntutan kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar 142% tidak akan berubah. Karena gaji dan tunjangan hakim tidak berubah selama 12 tahun terakhir, mereka memandang kenaikan sebesar 142% tersebut sebagai jumlah yang wajar, Mereka berpendapat bahwa melakukan hal ini juga penting untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dan martabat para hakim, menurut mereka hal itu juga diperlukan dalam rangka memperkuat martabat hakim di Indonesia sebagai negara hukum.[[6]](#footnote-6)

Menyusul aksi mogok massal hakim di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dikeluarkanlah kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. Pada 18 Oktober 2024, PP 44/2024 telah ditandatangani dan ditetapkan. Aturan pemerintah ini memuat kebijakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan hakim sesuai golongannya, serta harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Peraturan pemerintah ini memuat kebijakan tentang kenaikan gaji pokok dan tunjangan hakim sesuai golongannya, dengan catatan mereka juga memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti mengenai tunjangan yang telah tumbuh begitu cepat.. Kemudian dengan kenaikan tunjangan yang sangat cepat tersebut, kenaikan tunjangan jabatan yang paling rendah misalnya, adalah untuk hakim pratama di pengadilan kelas II yang menerima Rp 11.900.000. Kenaikan ini sangat cepat jika dibandingkan dengan ketentuan dalam PP 94/2012 yang hanya sebesar Rp 8.500.000. Untuk klasifikasi kenaikan tunjangan hakim yang lebih lengkap akan dipaparkan dalam hasil pembahasan penelitian ini. Dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan apakah akan adanya dampak terhadap kesejahteraan kepada para hakim serta ketika serta bagaimana kualitas mereka dalam memberikan sebuah putusan. Untuk itu penelitian ini juga akan melakukan observasi terkait dengan apakah masih ada nantinya hakim yang kesejahteraannya belum didapatkan setelah keluarnya kebijakan pemerintah tersebut.

Dengan adanya latar belakang ini maka peneliti perlu mengetahui bagaiamana ketika seorang hakim ketika diberikan kenaikan tunjangan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang selama 12 tahun ini tidak mengalami sebuah perubahan dan dengan dilakukannya sebuah aksi mogok kerja dari para himpunan hakim yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan sebuah kebiajakan untuk menaikan tunjangan mereka serta bagaimana kualitas pengambilan keputusan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian : “Kenaikan Tunjangan Hakim Sebagai Bentuk Penigkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Dalam Perspektif Hukum Islam” (studi kasus PN Manado).

## Identifikasi dan Batasan Masalah

## Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti akan memfokuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

* 1. Identifikasi Masalah

1. kenaikan tunjangan hakim apakah mempunyai dampak terhadap kesejahteraan hakim serta profesionalisme (studi kasus PN Manado)
2. Bagaimana perspektif hukum islam terkait kenaikan tunjangan hakim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme (studi kasus PN Manado)
   1. Batasan Masalah :

a). PN yang akan menjadi objek penelitian yaitu PN Manado

b). Untuk subjek pada penelitian ini yaitu hakim di PN Manado

## Rumusan Masalah

## Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

* 1. Bagaimana kenaikan tunjangan hakim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan Profesionalisme (studi kasus PN Manado)?
  2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kenaikan tunjangan hakim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan profesionaliasme (studi kasus PN Manado)?

## Tujuan Penelitian

## Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu:

* 1. Untuk mengetahui kenaikan tunjangan hakim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme (studi kasus PN Manado)
  2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kenaikan tunjangan hakim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme (studi kasus PN Manado)

## Kegunaan Penelitian

## Secara Teoritis

## Untuk memberikan gambaran bagaimana ketika tunjangan dari seorang hakim diberikan kenaikan apakah mempunyai pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan serta profesionalisme dalam perspektif hukum islam (studi kasus PN Manado)

* + 1. Digunakan sebagai salah satu rujukan utuk kepentingan penulisan karya ilmiah bagi pihak – pihak yang berkepentingan.
  1. Secara Praktis
     1. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar S.H program studi Hukum Ekonomi Syariah.
     2. Untuk institusi, dari penelitian ini hasil yang didapatkan bisa dijadikan bahan untuk kualitas pengembanagan dan pendidikan IAIN Manado.
     3. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

## Definisi Operasional

## Menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis ingin memperjelas defiinisi yang terdapat dalam judul :

* 1. Hukum Islam

Syariah, atau hukum Islam, pada dasarnya bukan hanya sebagai suatu hukum agama mealinkan hukum Allah. Selain itu, hukum ini menyentuh setiap aspek kehidupan dan setiap bidang hukum. Akibatnya, secara teori, tidak ada undang-undang yang dapat mempertanyakannya, dan isinya bahkan tidak dapat dibantah.

Syariah secara sederhana didefinisikan sebagai jalan yang jelas yang telah ditunjukkan Allah kepada manusia. Jalan ini berbentuk hukum dan peraturan Islam, yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas.[[7]](#footnote-7)

Adapun pengertian dari Hukum Islam menurut para ulama dan ahli yaitu :

* + 1. Abdul Ghani Abdullah

Dalam bukunya, Abdul Ghani Abdullah mendefinisikan hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari dan merupakan komponen dari agama Islam. Ia juga mengemukakan gagasan bahwa Allah telah menetapkan dasar dan kerangka hukum hukum Islam. Menurut Abdul Ghani Abdullah, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara manusia dan alam semesta. Hukum Islam juga mengatur bagaimana manusia dan alam semesta berinteraksi.

* + 1. Amir Syarifuddin

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diterima sebagai hasil wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah.[[8]](#footnote-8)

Kita dapat menyimpulkan bahwa dasar fundamental hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, dapat dipahami seperti itu. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sebagaimana tersirat dari namanya, atau bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dan bahkan dengan semesta.

* 1. Tunjangan

Tunjangan adalah bagian dari pendapatan atau penghargaan atas jasa yang tidak ada hubungannya dengan seberapa baik seseorang melaksanakan tugas pekerjaannya. Sebagai syarat keanggotaan, seorang karyawan atau sekelompok karyawan dapat menerima penghargaan tidak langsung yang dikenal sebagai tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran uang tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada anggota staf secara berkala atau sporadis. Tunjangan, yang dapat berupa uang tunai atau barang yang mempunyai manfaat serta menguntungkan, dapat didefinisikan sebagai distribusi sebagian keuntungan atau manfaat lain kepada karyawan sebagai tambahan selain dari gaji atau upah yang ditetapkan.[[9]](#footnote-9)

* 1. Kesejahteraan

Secara umum, kesejahteraan mengacu pada kondisi manusia di mana individu sejahtera, sehat, dan tenteram. Dalam ilmu ekonomi, keuntungan materi dikaitkan dengan kesejahteraan. Seperti dalam kasus kata "fungsi kesejahteraan sosial," kesejahteraan memiliki makna resmi atau teknis yang tepat. Kesejahteraan sosial, sebagaimana digunakan dalam kebijakan sosial, adalah ketersediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Frasa ini mengacu pada konsep negara kesejahteraan.[[10]](#footnote-10) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan.[[11]](#footnote-11)Pengertian lainnya tentang kesejahteraan menurut Hartoyo dan Noorma Bunga Aniri adalah sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat menjalani kehidupan yang terhormat, sehat, dan produktif. Bekerja dapat menghasilkan kesejahteraan itu sendiri.[[12]](#footnote-12)

* 1. Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata professional. Profesional sendiri dapat didefinisikan sebagai otoritas di bidangnya. Seorang manajer harus mampu menunjukkan keahliannya di sektornya jika ia ingin dianggap sebagai seorang profesional. Ia harus mampu menghasilkan karya bermutu tinggi. Sikap seseorang terhadap karirnya tercermin dalam pembahasannya tentang profesionalisme. Sederhananya, profesionalisme adalah perilaku, pendekatan, dan atribut yang membedakan suatu profesi. Jika pekerjaan seseorang memenuhi persyaratan etika atau teknis suatu profesi, mereka dianggap profesional. Menurut Syafruddin Nurdin, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan tambahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimanfaatkan sebagai perangkat dasar untuk diaplikasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dari sinilah asal kata "profesional". Profesionalisme mencakup semua pegawai atau pejabat, apa pun jabatannya. Kompetensi dan keahlian seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan disiplin dan jenjang tertentu dapat dipandang sebagai profesionalisme. Profesionalisme adalah kesesuaian (fitness) keterampilan birokrasi (kompetensi) dengan tuntutan tugas (regulasi). Terbentuknya aparatur yang profesional bergantung pada kesesuaian kemampuan dan kebutuhan tugas. Artinya, arah dan tujuan yang diinginkan organisasi tercermin dalam pengetahuan dan kemampuan aparatur tersebut.[[13]](#footnote-13)

## Tinjauan Pustaka

## Adapun penelitian sebelumya yang menjadi rujukan penulis dalam meneliti permasalahan karena adanya keterkaitanya dengan pembahasan yakni sebagai berikut :

Hasil peneltian Nursandika, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area Medan Tahun 2024. Dengan judul skripsi : “Hubungan Persepsi Terhadap Gaji Tahunan Dengan Kepuasan Kerja Di PT.Prima Sarana Usaha Mandiri”.[[14]](#footnote-14) Dengan hasil penelitian : Para pekerja ini juga bekerja juga sesuai dengan apa yang mempersepsikan mereka mengenai hasil yang akan mereka dapatkan kedepannya. Tidak hanya mengumpankan tenaga mereka, tetapi juga persepsi mempengaruhi dan berperan bagaimana mereka bersikap, apakah mereka mendapatkan kepuasan kerja atas apa yang mereka persepsikan. Sehingga mempengaruhi cara mereka berkerja dan hasil yang mereka berikan kepada pihak perusahaan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian diatas membahas terkait dengan bagaimana persepsi para pekerja terhadap gaji yang akan mereka terima bisa membuat kepuasan mereka bekerja semakin meningkat dan bisa memberikan sumbangan balik kepada pt tersebut memposisikan diri mereka sesuai dengan apa yang dari tempat mereka bekerja tersebut dan juga kepuasan bekerja berpengaruh terhadap apa yang nanti mereka akan hasilkan dan berikan pada pt tersebut sedangkan penelitian ini membahas mengenai kesejahteraan hakim yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana profesionalisme mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Persamaan dari penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai kesejahteraan mealui gaji ataupun tunjangan.

Hasil penelitian Lisa Marwah, Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2023. Dengan Judul Skripsi “Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama Dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penangan Waris Islam di PA Wates”.[[15]](#footnote-15) Dengan hasil penelitian : Enam indikator profesionalisme telah dipenuhi oleh Lembaga Pengadilan Agama Wates, meliputi: memiliki pengalaman kerja (keahlian) sesuai dengan tugas dan tuntutan jabatan yang unik; memiliki latar belakang pendidikan; memiliki wawasan sosial yang luas; diakui oleh negara dan masyarakat; tepat waktu; dan memiliki prosedur yang mudah dipahami. Jumlah pihak, tempat tinggal para pihak, kehadiran para pihak, jumlah dan posisi objek perkara, perkara itu sendiri, dan jenis objek merupakan beberapa aspek yang terus menimbulkan tantangan tertentu terkait waktu pelaksanaan. Secara ringkas, Pengadilan Agama Wates telah secara efektif dan kompeten menangani permasalahan sengketa warisan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian diatas meneliti tentang bagaimana profesionalisme lembaga pengadilan agama dalam memberikan sebuah putusan pada warga masyarakat setempat sedangkan dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh adanya kenaikan tunjangan pada hakim bisa mempengaruhi seorang hakim terhadap profesionalismenya, untuk studi kasusnya juga berbeda peneltian diatas pada pengadilan agama sedangkan penelitian ini pada pengadilan negeri. Persamaanya yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas bagaimana profesioalisme itu diterapkan pada apa yang mereka kerjakan.

Hasil penelitian Fifit F. Lutfianingsih, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Joanesi Effendy, Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2024. Dengan judul jurnal:“ Konstruksi Relasi Kesejahteraan Hakim Dengan Kualitas Kerja Yudisial Yang Berkeadilan”.[[16]](#footnote-16) Dengan hasil penelitian : bahwa kesejahteraan dan gaji hakim masih tergolong rendah. Konsep ini memiliki dukungan empiris jika dikaji dari perspektif perbandingan beban kerja dan gaji di berbagai negara Asia. Kualitas keputusan yang diambil dan kesejahteraan hakim berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, responden tidak menyebutkan kesejahteraan hakim sebagai alat untuk memberikan putusan yang adil. Kualitas keadilan dipengaruhi secara positif oleh hubungan antara kesejahteraan hakim. Hubungan yang dibangun antara kesejahteraan hakim dan standar keadilan merupakan hubungan positif yang memiliki landasan teoritis baik dalam teori ekonomi maupun realisme. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang gaji ataupun pendapatan dari seorang hakim cenderung rendah dan juga mengkaji konstruksi relasi terhadap kualitas putusan yang diberikan sedangkan penelitian ini membahas tentang kenaikan tunjangan dari seorang hakim apakah bisa menekan kesejahteraanya, yang diketahui bahwasanya pemerintah pada tahun lalu telah mengeluarkan sebuah kebijakan dengan menaikan gaji dan tunjangan para hakim. Persamaannya yaitu keduaya membahas tentang kesejahteraan dari seorang hakim dengan sebuah beban kerja yang sangat besar yang harus dilakukan.

Hasil penelitian Adeng Septi Irawan, Pengadilan Agama Sukamara Kalimantan Tengah, Tahun 2024. Dengan judul jurnal: “Menggagas *Endowment* *Fund* Bidang Hukum dan Keadilan: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Martabat Hakim”.[[17]](#footnote-17) Dengan hasil penelitian : Sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan, kesejahteraan hakim belum terlaksana sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang masih belum jelas. Tentu saja hal ini berdampak pada kedudukan hakim sebagai pelaku utama peradilan dan penegakan hukum. Bagi masyarakat pencari keadilan, penegakan hukum dan keadilan terus berjalan. Tentu saja hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya. Jika PP 94 Tahun 2012 tidak dimutakhirkan dan RUU tentang Jabatan Hakim tidak dibahas dan disahkan, maka akan lebih baik jika dibuat peraturan perundang-undangan tentang dana abadi bidang hukum dan peradilan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan birokrasi dan sumber daya manusia (SDM). Tentu saja, dana ini tersedia untuk digunakan oleh semua lembaga yang terkait dengan hukum dan keadilan, bukan hanya Mahkamah Agung. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas membahas terkait dengan adanya gagasan untuk dibuatkan *endowment fund* untuk digunakan pada kepentingan peradilan terutama pada kesejahteraan hakimdan juga untuk mendapatkan legalitas hukum sedangkan penelitian tentang kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan tunjangan apakah mempunyai pengaruh pada kesejahteraan hakim serta bagaimana profesionalitanya terhadap sebuah pengambilan keputusan. Persamaannya keduanya membahas masalah tentang kesejahteraan pada hakim.

Hasil penelitian Putri S.A. Dinar, Chesarya A. Permataningtyas, Ridlo I. Addiasar, Shelma F.C. Kusumaningsih, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2024. Dengan judul jurnal: “Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Menegakkan Integritas”.[[18]](#footnote-18) Dengan hasil penelitian : Kesejahteraan hakim belum dapat dipenuhi oleh hak dan fasilitas keuangan bagi hakim yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Berdasarkan data terkini, gaji pokok masih dianggap sebagai bagian yang kurang memuaskan dari kesejahteraan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa risiko dan kewajiban tugas yang harus diemban hakim harus diperhatikan dalam upaya pemenuhan kesejahteraannya. Hakim memiliki pengaruh yang besar karena mereka menegakkan supremasi hukum, dan tindakan mereka berdampak langsung pada masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa kesejahteraan hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap integritasnya. Perilaku koruptif kemungkinan akan terjadi jika kebutuhan hakim tidak terpenuhi*.* Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas membahas bagaimana kesejahteraan hakim tersebut bisa diwujudkan karena apabila kesejahteraan tersebut cenderung tidak diberikan kepada para hakim maka kemungkinan korupsi bisa terjadi sedangkan penelitian ini membahas bagaimana pengaruh dari kenaikan tunjangan pada hakim ini bisa menekan kesejahteraan meraka. Persamaanya Keduanya membahas tentang kesejahteraan hakim.

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Hakim

Hakim dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari (الحاكم) jamaknya *hukkām* merupakan *ism fā'il* dari kata *al-hakam* yang akar katanya adalah *al-hukm*, terdiri atas huruf-huruf *hā'-kāf-mīm* yang secara etimologis berarti "mencegah", dan secara leksikal adalah "menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diingininya". Dari sini kemudian dapat di mengerti terkait batasan dari pendefinisian yang terdapat dalam kata hakim dapat disimpulkan bahwa pengertian hakim adalah menghentikan terjadinya masalah, kekerasan, hal yang mendatangkan mudharat, cedera, ketidakadilan, dan hal-hal buruk lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim dapat diartikan sebagai dua hal yang berbeda. Pertama, orang yang memutus suatu perkara di pengadilan atau tribunal dan putusannya bersifat final.

Hakim adalah orang yang cerdas, cerdik, dan bijaksana dalam tindakan dan perilakunya. Sejak saat itu, masyarakat mulai mengenal hakim sebagai orang yang karena pemahamannya, dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Dalam bahasa Arab, istilah "hikmah" sendiri berarti berpengetahuan luas, cakap, cerdik, dan cerdas. Selain itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa nama dan sifat Tuhan Yang Maha Suci adalah al-hakam dan al-hakim dalam *(asmā' al-husnā),* dan qadha,merupakan penentuan yang matang berdasarkan alasan yang jelas dan dan erat terhadap semua hal, merupakan salah satu cabang (makna tambahan) dari sifat ini. Orang yang memiliki sifat ini harus belajar lebih banyak, khususnya tentang Allah.

Dari sini jelaslah bahwa hakim setara dengan qadhi, orang yang memberikan keputusan dalam perselisihan agama berdasarkan kehendak Allah. Oleh karena itu, salah satu prasyarat bagi seorang hakim adalah meningkatkan pemahamannya tentang Allah. Di sisi lain, Abdullah Sani mendefinisikan hakim dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pegawai negeri sipil yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Hakim bertugas memimpin persidangan, memeriksa dan memutus perkara, serta mengambil keputusan hukum.

Hakim harus memahami betul tanggung jawabnya, termasuk memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. Lebih lanjut, karena hakim memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, maka hakim harus bermoral dan berakhlak mulia agar dapat menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dalam terminologi Islam, hakim merupakan sebuah sumber hukum. Hal ini tampak dalam definisi "hukum" yang dikemukakan oleh para ushuliyyin, yaitu khitab (perintah) Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh mukallaf.

Dengan kata lain, istilah *al-qadhi* identik dengan hakim. Keduanya bermakna sama, yaitu orang yang mengambil keputusan disebut juga sebagai orang yang memberlakukan hukum dalam dunia Islam. Oleh karena itu, hakim disebut sebagai "orang yang menyelesaikan sengketa hukum yang datang kepadanya, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun yang menyangkut hamba-hambanya."[[19]](#footnote-19)

* 1. Unsur – unsur dalam kehakiman
     1. Hakim atau *Qadhi*

Hakim menjalankan tugasnya dengan menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut baik itu berupa gugatan ataupun persengketaan yang diajukan dalam sebuah persidangan. Dalam menjadi seorang hakim tentunya memiliki syarat: laki laki, memiliki akal yang sehat, Beragama Islam, adil dalam hal apapun, memiliki ilmu pengetahuan atau terdidik serta tidak cacat.

* + 1. Hukum

Merupakan suatu putusan dari seorang hakim yang kemudian ditetapkan dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan anatara orang-oramng yang bersengketa yang tentunnya berdasarkan pada hasil ijtihad.

* + 1. *Mahkum Bihi* (hak objek pertama)

Hak asasi pada hakikatnya dapat dikaitkan dengan Tuhan, hak asasi manusia, atau keduanya yaitu hak Tuhan dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat pasif, artinya tidak akan ada akibat hukum atau sosial yang akan timbul jika pihak terkait tidak menuntutnya. Meskipun hak Tuhan bersifat aktif, siapa pun yang ditaklif wajib memenuhinya*.*

* + 1. *Mahkum Alaih* (tergugat)

Secara spesifik, pihak yang dituntut karena dianggap tidak pantas atau merugikan. Perlu disebutkan bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak selalu benar. Hakim akan menggunakan bukti yang ada untuk menentukan hukuman masing-masing orang. Karena itu, asas praduga tak bersalah, atau *husnudhan,* berlaku di pengadilan Islam.

* + 1. *Mahkum Lahu* (penggugat)

Yaitu orang yang melakukan gugatan sebuah hak kepada seseorang karena dianggap telah merugikan oleh pihak yang digugat.

* + 1. Putusan (vonis hukum)

Putusan majelis hakim untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan dikenal sebagai hukuman, vonis hukum, atau keputusan. Diktum keputusan dapat dinyatakan sebagai *qadha al-tarki* (penolakan tuntutan) atau *qadha al-ilzam* (pengabulan tuntutan).[[20]](#footnote-20)

1. Peranan Hakim Dalam Ranah Peradilan

Sistem hukum yang diadopsi atau ditegakkan suatu negara terkait erat dengan struktur kekuasaan kehakimannya. Kodifikasi (hukum tertulis) peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disetujui oleh negara melalui organisasi atau lembaga negara dengan kewenangan yang diperlukan berfungsi sebagai referensi hukum utama bagi negara-negara yang mengikuti sistem hukum sipil Eropa Kontinental *(civil law system)*.

Hukum adat, yang juga dikenal sebagai yurisprudensi dalam tradisi akademis, berfungsi sebagai rujukan hukum utama bagi negara-negara yang telah mengadopsi sistem hukum common law. Ini berarti bahwa putusan hakim berfungsi sebagai preseden atau rujukan hukum bagi pengadilan lain untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan dalam suatu kasus.

Secara teoritis, pengadilan berfungsi sebagai titik fokus aktivitas hukum di negara-negara yang menerapkan sistem ini. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menciptakan hukum yang sebenarnya. Struktur kekuasaan kehakiman yang relevan sebagian besar telah dibentuk oleh sistem hukum dari waktu ke waktu. Hakim, yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan pada dasarnya mengikuti konsep kodifikasi sebagai skala prioritas dalam menjalankan fungsi peradilan mereka, akan sangat dipengaruhi oleh negara-negara yang mengadopsi hukum perdata. Ini akan menciptakan peluang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis daripada dibatasi oleh sistem kodifikasi (hukum tertulis). Namun, sistem *common law* juga memungkinkan untuk menyimpang dari prinsip berbasis preseden.[[21]](#footnote-21)

Sistem ketatanegaraan Indonesia mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan otonom yang digunakan oleh Mahkamah Agung, badan-badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

* 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  2. Badan lainnya yang mempunyai berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, keduanya semakin menegaskan kekuasaan kehakiman.

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:[[23]](#footnote-23) “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Selaras dengan pemahaman aturan di atas, dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui badan-badan perencanaan yang dibentuk oleh undang-undang, yang tanggung jawab utamanya adalah menerima, meninjau, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan ke hadapan mereka. Menurut tugas utama ini, pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara yang dapat diadili untuk diperiksa dan diadili dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak jelas atau tidak ada. Ini berarti bahwa suatu perkara yang diajukan oleh seorang pencari keadilan harus ditinjau, diadili, dan diputuskan oleh pengadilan.

Hakim dalam lingkungan peradilan diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab dan fungsi kekuasaan kehakiman dengan cara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan tanpa campur tangan dari lingkungan kekuasaan lain atau pengaruh faktor lain yang tidak berpihak pada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa bertindak, mencermati dinamika sosial, serta memahami asas hukum dan rasa keadilan yang merasuki masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undan Nomor 48 Tahun 2009, bahwa:[[25]](#footnote-25)

* + - 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
      2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
      3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Syarat bagi hakim hanyalah memiliki kekuatan hukum tetap dan keahlian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, secara normatif (yuridis-formal), negara telah menjamin kemampuan hakim untuk menjalankan tugas peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menaunginya.

1. Hakim dalam Penegakan Keadilan

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, hakim memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi sejumlah nilai. Aspek atau atribut sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikologis, itulah yang dimaksud dengan nilai dalam konteks ini. Manusia memanfaatkan nilai-nilai yang dimilikinya sebagai landasan, pembenaran, atau sumber motivasi bagi emosinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

Dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia, hakim merupakan profesi yang mandiri, yang mengabdikan diri untuk menegakkan keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila. Prinsip keadilan dan kedamaian terkandung di dalamnya..

Selain itu, tugas hakim untuk menyelenggarakan persidangan secara langsung, cepat, dan terjangkau sehingga setiap orang dapat memperoleh keadilan merupakan cerminan pentingnya keadilan. Dalam memberikan putusan, hakim juga harus berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah dan tidak boleh membeda-bedakan siapa pun. Tugas menegakkan keadilan ini diakui baik secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal kepada sesama manusia.

Hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya membingungkan atau tidak ada untuk dapat menganalisis dan mengadilinya. Hakim harus menyelidiki nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat apabila ia melihat adanya kekosongan hukum yang diakibatkan oleh tidak adanya atau ambiguitas peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perkara. Nilai ini kita sebut sebagai nilai keterbukaan.

Hakim diharuskan menghormati kewenangan dan kerja sama korps. Konferensi, yang berbentuk panel dengan minimal tiga hakim, menunjukkan pentingnya kolaborasi. Musyawarah tertutup diadakan oleh para hakim ini sebelum menjatuhkan hukuman.

Hakim harus selalu mempertanggungjawabkan pikiran dan perbuatannya. Ini berarti bahwa ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa secara vertikal. Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban horizontal" adalah pertanggungjawaban yang ditujukan kepada masyarakat umum dan lembaga peradilan yang lebih tinggi.

Hakim wajib menjunjung tinggi nilai dari sebuah objektivitas

Hakim dikategorikan sebagai profesi yang mulia *(officium nobile),* yaitu pekerjaan yang pada hakikatnya adalah pengabdian kepada masyarakat dan bangsa, selain juga sebagai profesi hukum yang terkadang dikarakterisasikan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, etika dalam semua profesi mencakup pedoman-pedoman mendasar yaitu, karena pekerjaan itu harus dilihat sebagai suatu layanan, memiliki kualitas "tanpa pamrih" sangat penting bagi kemajuannya, pelayanan profesional yang mengutamakan kebutuhan para pencari keadilan merupakan acuan cita-cita yang terpuji, masyarakat luas harus selalu menjadi fokus pengembangan profesional, tingkat persaingan yang tinggi dalam bidang jasa diperlukan untuk memastikan dan meningkatkan mutu praktisi profesional.

Oleh karena profesi hukum pada hakikatnya merupakan pelaku utama atau tokoh sentral dalam proses peradilan, maka senantiasa perlu untuk mengembangkan kepekaan hati nurani, menjunjung tinggi integritas dan kecerdasan moral, serta menjadi lebih profesional dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim juga harus memiliki pengetahuan khusus dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam sumpah hakim yang menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan hakim, maka segala kewenangan dan tanggung jawab hakim harus digunakan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa membeda-bedakan siapa pun. Karena hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar, maka putusan pengadilan yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," menunjukkan kewajiban untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, yang harus dipertanggungjawabkan baik secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal kepada seluruh masyarakat.

Menurut filsafat, menegakkan keadilan merupakan tujuan utama tugas hakim. Melalui asas-asas yang terdapat dalam etika profesi, cita-cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (realitas normatif) harus diwujudkan dalam *das sein* (realitas alamiah). Empat Perintah Hakim atau *The Four Commandments for Judges dari Socrates* karya Socrates merupakan salah satu etika profesi yang menjadi pedoman bagi profesi ini sejak awal peradaban manusia. Sebagai pelaku utama, hakim dituntut untuk berpegang teguh pada empat pokok kode etik hakim, yaitu *to hear corteously* (mendengar dengan sopan dan beradab), *to answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana), *to consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun), *to decide impartially (*memutus tidak berat sebelah).

Risalah Khalifah Umar bin Khatab kepada Musa Al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah, merupakan salah satu karya sejarah tentang keadilan dalam peradaban Islam yang masih bertahan. Di dalamnya dijelaskan tentang etika profesi, selain itu juga tentang pentingnya keadilan, teknik pemeriksaan, dan alat bukti. Berikut ini adalah kode etik hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab tersebut. Menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam majelis, pendapat, dan simpulan agar pihak yang lemah tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan dari hakim dan pihak yang lebih terhormat tidak mengungkit-ungkit kondisi hakim.[[26]](#footnote-26)

Perdamaian harus selalu diupayakan di antara pihak-pihak yang berseberangan. Kecuali perdamaian yang memperbolehkan yang tidak sah atau melarang yang sah Lebih jauh, tindakan, sikap, dan karakter hakim harus tercermin dalam Panca Dharma Hakim, lambang lembaga peradilan, sesuai dengan kewenangan dan cerminannya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, Panca Dharma Hakim, yaitu.[[27]](#footnote-27)Kartika melambangkan Tuhan Yang Mahakuasa. Istilah "cakra" merujuk pada hakim yang harus berdoa memohon keadilan. Candra menunjukkan bahwa hakim harus berdoa dengan cerdas atau berwibawa. Seorang hakim harus jujur, yaitu Tirta, dan berbudi luhur, atau tidak tercela, yaitu Sari.

Kelima dharma tersebut menggambarkan perilaku hakim dan harus senantiasa diterapkan dan diwujudkan oleh seluruh hakim dalam sikap dan tindakannya yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu: keadilan, kebijaksanaan, kewibawaan, keluhuran budi, dan kejujuran. Berperilaku sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tanda bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan terdorong untuk bertindak secara moral dan bijaksana sesuai dengan ajaran dan kaidah agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagai pejabat hukum, seorang hakim harus memiliki kepribadian yang beretika, yaitu: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga nama baik, wibawa, dan martabat hakim, berlaku jujur ​​dan tidak tercela, menjadi teladan bagi masyarakat, menjauhi perbuatan asusila dan perbuatan yang tidak pantas di muka umum, menjauhi perbuatan yang merendahkan martabat hakim, bersikap jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, berkepribadian, sabar, berilmu, mau memajukan (meningkatkan) nilai keadilan, dapat dipercaya, dan berwawasan luas.

1. Pengertian Tunjangan

Tunjangan adalah setiap fasilitas tambahan yang diberikan kepada karyawan atau pekerja. Mengacu pada pengertian tunjangan kerja menurut para ahli:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sikula: "Tunjangan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung, seperti tunjangan hari tua, waktu liburan, tabungan, dan layanan fisik seperti mobil dinas, rumah dinas, fasilitas olahraga untuk memperingati hari besar dan sebagainya".

Hasibuan menyatakan: "Tunjangan adalah setiap penghasilan yang diperoleh oleh karyawan dalam bentuk uang tunai atau barang dagangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai imbalan atas jasanya terhadap perusahaan.

Wibowo berpendapat bahwa "pengadaan langsung dan tidak langsung adalah tunjangan." Karyawan dapat menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai atau lainnya.[[28]](#footnote-28)

1. Tunjangan Hakim

Berikut ini disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung:

1. Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa:

a. tunjangan keluarga;

b. tunjangan beras dan;

c. tunjangan kemahalan.

2. Tunjangan keluarga

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

* + - * 1. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen); dan
        2. tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.

3. Tunjangan beras

Sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak. Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk uang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

* + - 1. Tunjangan kemahalan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.[[29]](#footnote-29)

Selain itu, tunjangan jabatan juga bertambah dengan cepat. Tunjangan jabatan tertinggi yang diberikan kepada Ketua Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Banding berdasarkan PP 44/2024 adalah sebesar Rp56.500.000, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp40.200.000. Tunjangan terendah diberikan kepada hakim pratama pada pengadilan kelas II, yaitu sebesar Rp11.900.000. Selain itu, tunjangan ini bertambah dengan cepat jika dibandingkan dengan ketentuan dalam PP 94/2012 sebesar Rp8.500.000. Jokowi menandatangani PP 44/2024 yang mengumumkan tunjangan tambahan bagi hakim, termasuk tunjangan kemahalan, izin beras, dan tunjangan keluarga, di samping gaji pokok dan benefitnya. Tunjangan keluarga, yang meliputi tunjangan istri/suami sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 2% untuk maksimal dua orang anak, dihitung dari gaji pokok. Setiap anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan maksimal dua orang anak, menerima 10 kg beras. Peraturan menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tersebut mengatur lebih lanjut jumlah uang yang dapat diberikan sebagai tunjangan beras. Ada tiga zona dan satu zona khusus dengan perizinan yang mahal.[[30]](#footnote-30)

1. Kesejahteraan Hakim

Kesejahteraan hakim yang mengabdi atas nama keadilan seharusnya dijamin oleh pemerintah. Kesejahteraan hanya akan tumbuh dari hakim yang didukung oleh negara karena beban kerja yang berat, kebutuhan akan pengadilan yang bermutu, dan asas-asas keadilan. Banyak kelompok yang merespons gerakan mogok kerja yang menuntut penghapusan serentak ribuan hakim di Indonesia selama satu minggu, dari 7-11 Oktober 2024.

Karena gaji dan tunjangan tidak pernah naik selama dua belas tahun, aksi yang dilakukan oleh para hakim muda ini dianggap sebagai bentuk protes tanpa kekerasan oleh para hakim untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum dalam keterangannya menyatakan, meski telah berupaya sejak 2019, permohonan kenaikan gaji hakim belum juga dikabulkan. Pada 2024, IKAHI dengan bantuan Mahkamah Agung (MA) menyurati Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mengajukan kenaikan gaji hakim. Dalam suratnya, MA mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim Mahkamah Agung (PP No. 94 Tahun 2012) diubah.

Menurut Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, pihaknya telah lama memperjuangkan kenaikan gaji hakim sejak 2019, tetapi hingga kini belum juga terealisasi. Pada 2024, IKAHI dengan bantuan Mahkamah Agung (MA) menyurati Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mengupayakan kenaikan gaji hakim. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim di Mahkamah Agung (PP No. 94 Tahun 2012) diminta oleh Mahkamah Agung dalam suratnya. Rencana ini saat ini sedang dilaksanakan di Kementerian Keuangan dan masih dalam proses pembahasan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan RB).

Tunjangan jabatan hakim akan disesuaikan sebesar 40% hingga 41% sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan bagi Hakim di Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa gaji pokok dan penghasilan pensiun hakim tidak lagi ditangguhkan atau disamakan dengan ketentuan gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, hakim berhak atas tunjangan jabatan bulanan yang besarannya ditentukan berdasarkan golongan pengadilan, wilayah penugasan, dan jenjang kariernya.[[31]](#footnote-31)

Di Indonesia, hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan sistem peradilan, namun kesejahteraan mereka belum sepenuhnya diperhatikan. Peraturan yang mengatur masalah ini belum banyak mempertimbangkan hak-hak keuangan dan fasilitas hakim, serta kurangnya kesejahteraan mereka, yang berdampak pada mutu putusan. Oleh karena itu, penyediaan kesejahteraan memainkan peran penting dalam menegakkan integritas hakim dan penegakan hukum.[[32]](#footnote-32) Upaya hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya terhambat, sehingga integritasnya pun terancam. Kenyataannya, masalah yang makin pelik ini muncul dari regulasi yang saat ini belum mampu mendukung semua hak dan fasilitas finansial yang dinikmati hakim. Pentingnya pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum tidak dapat dipungkiri lagi. Untuk menciptakan putusan yang berintegritas, kerangka negara harus dipahami sebagai cara untuk menjamin kesejahteraan penegak hukum, termasuk hakim.[[33]](#footnote-33)

Karena hakim yang berkecukupan harus menahan godaan saat menjalankan tanggung jawab terhormatnya sebagai hakim dan sebagai individu yang bertugas menafkahi keluarganya, maka derajat kesejahteraan hakim merupakan upaya memanusiakan hakim agar putusannya adil. Ketika negara mampu secara signifikan memenuhi kesejahteraan hakimnya, negara seharusnya tidak meromantisasi mereka dengan kisah pengabdian.[[34]](#footnote-34)

1. Aspek – Aspek kesejahteraan Hakim

Terkait dengan negara, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks negara adalah bagaimana negara menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk hakim, agar dapat memberikan putusan yang berintegritas dan berkualitas. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pemenuhan kesejahteraan hakim, yang menyatakan bahwa "setiap hakim berhak memperoleh kesejahteraan dan keamanan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara secara optimal."

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan bagi Hakim pada Mahkamah Agung mengatur tentang kesejahteraan hakim di Indonesia. Hak dan fasilitas keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dana pensiun, rumah dinas, honorarium, biaya keamanan, dan sebagainya termasuk dalam kesejahteraan ini. Negara wajib memenuhi setiap hak hakim tersebut. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk hakim, agar dapat memberikan putusan yang berintegritas dan berkualitas. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pemenuhan kesejahteraan hakim, yang menyatakan bahwa “setiap hakim berhak memperoleh kesejahteraan dan keamanan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara secara optimal.”

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung mengatur tentang kesejahteraan hakim di Indonesia. Kesejahteraan ini meliputi hak keuangan dan fasilitas termasuk perumahan dinas, dana pensiun, biaya layanan, biaya keamanan, gaji pokok, dan tunjangan, antara lain. Negara wajib menegakkan hak-hak masing-masing hakim ini.[[35]](#footnote-35)Kesejahteraan hakim dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang membahas berbagai aspek kehidupan dan karier mereka. Elemen-elemen ini dijelaskan sebagai berikut:

Aspek Ekonomi

Gaji dan Tunjangan : hakim harus diberi gaji dan tunjangan yang layak untuk membiayai hidup mereka. Motivasi dan kinerja hakim dapat ditingkatkan dengan kompensasi yang layak.

Jaminan Pensiun: Ketika masa jabatan hakim berakhir, rencana pensiun yang kuat memberi mereka rasa aman.

Aspek Sosial

Status dan Rasa Hormat: Sebagai pejabat penegak hukum, hakim harus mendapatkan rasa hormat sosial. Integritas dan martabat profesi bergantung pada pengakuan sosial ini.

Dukungan Keluarga: Kesejahteraan keluarga hakim juga penting. Inisiatif dukungan keluarga, seperti dukungan untuk pendidikan anak-anak, dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Aspek kesehatan

Asuransi kesehatan: Sangat penting bagi hakim untuk memiliki akses ke perawatan medis yang berkualitas, termasuk asuransi kesehatan yang ramah keluarga.

Kesehatan mental: inisiatif yang mendukung kesehatan mental hakim untuk membantu mereka mengelola tekanan dan stres akibat tugas mereka.

Aspek Lingkungan kerja

Sarana kerja : meliputi ruang kerja yang nyaman dan aman serta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas.

Dukungan Administrasi: penyediaan tenaga administrasi yang efektif dan dukungan untuk membantu hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Aspek Pendidikan dan Pengembangan

Kursus & Pendidikan Berkelanjutan: kesempatan untuk berpartisipasi dalam seminar dan kursus untuk meningkatkan keahlian hukum.

Ketersediaan Sumber Daya Hukum: perpustakaan hukum dan sumber informasi yang memadai tersedia untuk membantu pengambilan keputusan.

Aspek Keamanan

Perlindungan dari Ancaman: jaminan keselamatan hakim saat menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan terhadap bahaya fisik atau paksaan dari pihak tertentu.

Pengambilan Keputusan: Melindungi hakim dari tekanan luar atau campur tangan politik yang dapat memengaruhi pilihan mereka merupakan aspek lain dari kesejahteraan mereka.

Aspek Etika dan Profesionalisme

Kode Etik: menegakkan profesionalisme dan integritas hakim melalui penerapan kode etik yang tegas dan tidak ambigu.

Sistematis: sistem pengawasan yang jelas bagi para pengawas untuk menjamin bahwa hakim melaksanakan tanggung jawabnya secara imparsial dan adil.

Aspek Psikologis

Ketersediaan layanan konseling untuk membantu hakim dalam mengelola tekanan emosional dan psikologis yang mungkin timbul akibat pekerjaan mereka dikenal sebagai dukungan psikologis.

*Work-Life Balance:* peraturan yang mendorong hakim untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dengan mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Dengan memperhatikan dan meningkatkan aspek-aspek kesejahteraan ini, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, menjaga integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

1. Dasar Hukum Profesionalisme

Menurut Al-Quran sendiri, kita harus bisa menjadi pribadi yang amanah dalam melaksananakn setiap apa yang telah diberikan kewajiban kepada kita, mampu menangani tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, dan ketika kita diminta untuk menegakkan keadilan, kita harus melakukannya dengan cara yang memastikan tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh keputusan kita. Beberapa ayat dari Al-Quran berikut membahas masalah ini:

* 1. Al- Quran

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa : ayat 58).[[36]](#footnote-36)

* 1. Hadist

Kita harus senantiasa berusaha untuk bertindak secara moral dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk bersikap profesional dalam bekerja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنّ اللَّهَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional)”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Rasulullah SAW dalam hadits ini menyatakan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang melaksanakan tugasnya dengan itqan. Dalam hadits ini, *"itqan"* mengacu pada sifat bekerja dengan tekun, ikhlas, dan semaksimal kemampuan seseorang, atau yang dikenal dengan istilah profesionalisme. Ia akan bekerja sama dengan orang yang tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga berusaha memberikan hasil yang maksimal dan memenuhi standar kualitas yang disyaratkan.

Menjadi profesional di tempat kerja sangat penting karena dapat membantu kita dan umat Islam pada umumnya untuk menampilkan citra yang positif. Namun, karena banyaknya kesulitan dan hambatan yang sering kita hadapi, menjadi seorang profesional bukanlah tugas yang mudah. ​​Kita berjuang untuk mempertahankan profesionalisme kita karena banyaknya harapan dan tekanan yang kita hadapi. Misalnya, perselisihan dengan rekan kerja atau tekanan untuk mencapai tujuan yang tinggi.[[37]](#footnote-37)

1. Profesionalisme Hakim

Definisi profesionalisme sebagai kata keterangan adalah pekerjaan yang benar-benar diselesaikan sesuai dengan kemampuan seseorang.[[38]](#footnote-38) Keinginan untuk bekerja secara rasional, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan wewenang, serta bekerja secara transparan sesuai dengan sistem, ketentuan, dan tahapan kerja tertentu agar dapat diperiksa, juga dapat dipandang sebagai profesionalisme. Bahasa *Anglo-Saxon* yang mencakup pengertian kemampuan, keahlian, dan disiplin merupakan asal muasal profesionalisme.

Nilai-nilai kompetensi, kesantunan, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan umum sering dibahas dalam kaitannya dengan profesionalisme. Profesionalisme sendiri, menurut KBBI, memiliki makna yang berkaitan dengan panggilan hidup dan memerlukan bakat-bakat khusus untuk melaksanakannya. Profesionalisme adalah perilaku, pengetahuan, atau atribut seorang profesional. Dengan demikian, seseorang dapat dianggap profesional jika ia memiliki pengetahuan atau kecakapan yang diperlukan untuk bidang yang digelutinya dan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. "Menjalankan tugas sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab dan integritas penuh, serta kemauan untuk selalu belajar dan berkembang" adalah apa yang didefinisikan oleh pakar manajemen Stephen Covey sebagai profesionalisme.

Menurut Laura L. Bierema, profesionalisme adalah seperangkat kemampuan, keahlian, dan prinsip moral yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Mengambil kewajiban yang sejalan dengan standar profesional masyarakat adalah aspek lain dari profesionalisme. Sondang P. Siagian mendefinisikan profesionalisme sebagai kemampuan untuk secara akurat melakukan tugas dengan cara yang berkualitas tinggi, tepat waktu, tuntas, dan mengikuti proses yang mudah dipahami dan dipatuhi oleh klien. Menurut *Cambridge* *Dictionary* profesionalisme adalah gabungan dari semua atribut yang dikaitkan dengan mereka yang memiliki pelatihan dan keterampilan. *Oxford Dictionary*, di sisi lain, mendefinisikan profesionalisme sebagai tingkat keterampilan atau keahlian yang diharapkan dari seorang profesional. Kemampuan atau keahlian yang dimiliki hakim sesuai dengan kompetensinya dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan pengembangan dari Pancasila dan kode etik hakim disebut sebagai profesionalisme hakim.

Dengan demikian, profesionalisme hakim diartikan sebagai keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan kewajibannya. Keinginan untuk bekerja secara logis, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan utamanya, serta bekerja secara transparan sesuai dengan sistem, aturan, dan tahapan kerja tertentu untuk memudahkan pemeriksaan perkara, selanjutnya dapat diartikan sebagai profesionalisme hakim.[[39]](#footnote-39)

Tiga faktor motivasi, pendidikan, dan pendapatan dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme, menurut Sullivan, seorang spesialis dalam kriminologi dan ilmu kepolisian AS. Prinsip *Well MES* aitu *well motivation* (motivasi yang baik), *Well education* (pendidikan yang baik), dan *Well Salary (gaji yang sesuai atau layak)* hal tersebut harus dipenuhi untuk menghasilkan profesional penegakan hukum yang baik.[[40]](#footnote-40) Individu yang bermotivasi tinggi akan menilai tingkat komitmennya terhadap pekerjaannya dan mencari cara untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Kompetensi dan bakat individu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan disiplin dan level tertentu dipandang sebagai profesionalisme itu sendiri. Sikap profesional adalah sikap moral yang didasarkan pada komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan yang diberikan. Keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan umum mendukung hal ini. Untuk menegakkan cita-cita profesionalnya, hakim harus selalu berupaya meningkatkan keterampilannya di bidang hukum. Berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pendidikan tersedia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter sehingga fungsi peradilan dapat dilakukan secara efektif, untuk mencegah hakim membuat pilihan yang buruk atau gagal mempertimbangkan keadaan yang menguntungkan salah satu pihak yang terlibat.

Hakim harus mendahulukan tanggung jawab peradilan mereka di atas upaya profesional lainnya. Konsep kebebasan peradilan bersifat universal dan berlaku di segala waktu dan tempat. Menurut pengertian ini, hakim pada hakikatnya bebas untuk menjalankan keadilan, yang meliputi kebebasan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara tanpa campur tangan pihak luar dengan tetap mematuhi hukum acara. Hakim berperan sebagai pelaksana hukum formil dan materiil dalam persidangan. Salah satu pelaku utama dalam proses penegakan keadilan dan hukum adalah hakim.

Undang-undang, peraturan, dan landasan hukum lainnya harus menjadi pedoman hakim dalam memberikan penjelasan. Hakim juga harus menjunjung tinggi asas-asas moral yang menjadi dasar kode etik dan standar perilaku hakim. Kode etik sendiri dipahami sebagai norma yang sistematis, dirancang dengan tujuan tertentu, yang didasarkan pada asas-asas moral dan merupakan evolusi etika. Kode etik akan menentukan dan mengatur perilaku yang benar dan salah, serta apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, perilaku adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan seseorang, baik sendiri maupun berkelompok, terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya. Tentu saja, perilaku—baik dalam hal sikap maupun pernyataan—harus dikaitkan dengan apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar etika bagi hakim dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dapat dilihat sebagai hal yang berbeda dari kode etik untuk persyaratan perilaku hakim. Ia juga mencakup pedoman moral bagi para hakim baik di dalam maupun di luar organisasi.

Sepuluh aturan dasar perilaku diatur oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Aturan tersebut meliputi bertindak secara adil dan jujur, bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana, bertindak secara independen, menjaga harga diri, bertindak dengan integritas tinggi, bersikap disiplin, bertindak dengan rendah hati, dan membuat pernyataan profesional.[[41]](#footnote-41)

### BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu.[[42]](#footnote-42) Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data – data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang meneliti ketentuan hukum yang relevan dan kejadian sosial yang sebenarnya. Penelitian yuridis empiris yaitu meneliti bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau ditegakkan terkait dengan setiap kejadian hukum unik yang terjadi di masyarakat. Atau, dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan atau situasi nyata yang benar-benar terjadi di masyarakat untuk mempelajari dan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya mengarah pada solusinya.

Penelitian ini menggunankan metode kualitatif untuk mengumpulkan datanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang terjadi dalam suatu lingkungan alamiah tertentu. Peneliti terlibat dalam penelitian kualitatif untuk memahami latar, keadaan, dan konteks kejadian alam yang berkaitan dengan subjek penelitian. Karena setiap fenomena memiliki konteks yang khas, maka semuanya berbeda satu sama lain. Memahami kondisi suatu konteks dengan menuntun pada uraian yang mendalam dan menyeluruh tentang potret kondisi dalam konteks alamiah *(natural setting),* tentang apa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam subjek penelitian, merupakan tujuan penelitian kualitatif.[[43]](#footnote-43)

## Pendekatan Penelitian

## Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan, Untuk menunjang pendekatan ini maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataaan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak. Berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kenaikan tunjangan pada hakim ini bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dan juga dalam profesionalitasnya dalam perspektif hukum Islam (studi kasus PN Manado)

**Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 18 Februari 2024 Sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Manado.

**Sumber Data dan Jenis Data**

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk mnjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Data Sekunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari skripsi ini antara lain: Al- Qur'an, hadits, dan buku-buku terkait profesionalitas hakim dan juga tingkat kesejahteraannya serta Undang-Undang.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim di PN Manado. Berikut metode yang dipakai untuk mengumpulakan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Observasi

Partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang sesungguhnya terhadap mewawancara dengan hakim yang ada di PN Manado

* 1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilkukan dua pihak yaitu pewancara dan yang diwancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemberi informasi

* 1. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ataupun jejak digital seperti rekaman,foto,video dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku buku, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

1. **Pengolahan data**
   * + - 1. Reduksi Data

Laporan atau karya tulis yang menyeluruh harus dibuat menggunakan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laporan tertulis disusun, diringkas, diringkas, poin-poin utama dipilih, dan elemen-elemen penting disorot. Berdasarkan kedekatan konsep, tema, dan kategori tertentu yang akan menawarkan deskripsi yang lebih akurat mencerminkan temuan pengamatan, data yang dikumpulkan akan disaring dan dipilih. Selain itu, jika perlu, buatlah lebih mudah bagi peneliti untuk mencari data lagi untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya.

* 1. Displai Data

Data yang diperoleh peneliti dieksplorasi sesuai rumusan masalah dan disusun dalam bentuk matriks untuk memudahkan peneliti melihat pola hubungan antar data yang ada.

* 1. Analisis Data

Untuk mengetahui jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses menguraikan suatu proyek penelitian menjadi unsur-unsur komponennya sehingga bentuk atau susunan objek yang diteliti dapat dilihat dengan mudah dan dapat dipahami maknanya. Agar peneliti tidak terbiasa apabila terlalu lama meninggalkan lapangan, maka analisis data di lapangan sebaiknya dilakukan segera setelah data diperoleh.

* 1. Deskripsi Dan Hasil Penelitian

Deskripsi temuan penelitian adalah penjelasan atau catatan yang disusun menggunakan data lapangan yang telah diolah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan kemampuan merekonstruksi serta menyusun beberapa lokasi dengan fitur yang relatif serupa. Kesimpulan penelitian disajikan dalam bentuk narasi dengan cara yang metodis dan logis, dengan mempertimbangkan sudut pandang pribadi peneliti, yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai profesional mereka.

* 1. Penyimpulan dan Verifikasi

Proses reduksi dan penyajian data diikuti oleh kesimpulan data. Lebih sedikit yang diketahui tentang kesimpulan tahap awal. Langkah-langkah berikut akan diambil agar lebih tepat dan tegas. Pengorbanan sementara diperlukan untuk kesimpulan. Metode verifikasi ini dikenal sebagai verifikasi validitas penelitian. Penelitian kualitatif diuji menggunakan terminologi yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), ketergantungan (reliabilitas), dan konformabilitas (objektivitas) semuanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengukur tingkat kepercayaan. Ada beberapa metode untuk mengevaluasi keandalan temuan studi lapangan, termasuk: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketertiban peneliti dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, triangulasi data, maksudnya pengujian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, diskusi dengan dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan mengecek terhadap hasil-hasil yang didapatkan.

* 1. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir berasal dari pengumpulan data yang telah rampung. Kesimpulan akhir diperoleh berdasar atas kesimpulan sementara yang telah di telah terverifikasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Mahzumy, M. N. S., Santika, P. L., & Anaghattha, T. A. (2024). Mengingatkan negara: Penyesuaian kesejahteraan hakim merupakan amanah konstitusi Indonesia. *Judex Laguens*

Angka, A. F. S., & Sutina, M. M. (2023). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Tunjangan, Beban Kerja Terhadap Kinerja ASN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir.*

Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

Budiman, Z. (2024). *Hubungan Persepsi Kenaikan Gaji Tahunan dengan Kepuasan Kerja di PT. Prima Sarana Usaha Mandiri* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Daryanto, S. S. (1997). Kamus bahasa Indonesia lengkap. Surabaya: Apollo.

Dinnar, P. S. A., Permataningtyas, C. A., Addiasar, R. I., & Kusumaningsih, S. F. C. (2024). Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Menegakkan Integritas. *Judex Laguens.*

El Syafi, R. D. W. Q., & Putri, I. D. R. (2024). Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim:(Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia) *Judex Laguens.*

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*

Fahri, H. (2021). Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman.

Gaji & Tunjangan Hakim Akhirnya Naik, Segini Besarnya !” , <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241023063115-4-582227/gaji-tunjangan-hakim-akhirnya-naik-segini-besarannya>

Hidayah, R., & Zarkasi, L. (2021). Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam. *Al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam*.

HIDAYAH, Y. N. (2021). *PENGARUH TUNJANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN (Suatu Penelitian Pada Karyawan Bagian Produksi PT INDORAMA SYNTHETICS Tbk* (Skripsi Universitas Siliwangi).

“Ini daftar kenaikan gaji dan tunjangan hakim <https://www.antaranews.com/berita/4416233/ini-daftar-kenaikan-gaji-dan-tunjangan-hakim>.

Irawan, A. S. (2024). Menggagas Endowment Fund Bidang Hukum dan Keadilan: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Martabat Hakim. *Judex Laguens*

Jilan, S., Febriyanti, D., Putri, C., & Mulyani, S. (2025). Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kansil, C. S., & Tobing, S. A. S. L. (2024). Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora.

Kementerian Agama, ‘ Q.S, Al – Imran’.

Kementerian Agama, ‘ Q.S, Al – A’raf’.

Kementerian Agama, ‘ Q.S, An – Nahl’.

Kementerian Agama, ‘Q.S An-Nisa’.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kurniawan, R. C. (2022). Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia melalui Pemantapan Media Massa. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.*

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada. *Judex Laguens*

Lestari, M. M., Nurwandi, A., Umami, Y., Sirait, I., & Khomsi, Y. (2024). BEBAN KERJA DAN STRES PADA PROFESI HAKIM:(Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung). MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Lutfianingsih, F. F., & Efendi, J. (2024). Konstruksi relasi kesejahteraan hakim dengan kualitas kinerja yudisial yang berkeadilan. *Judex Laguens*

Marwah, L. (2023). *Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama Dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

“Menjadi Profesional Merupakan Fardhu Ain” <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/05/31/menjadi-profesional-merupakan-fardhu-ain/>

Munawi, Faydhul Qadir, jilid VI.

Ngampo, M. A. (2017). HAKIM DALAM PERSPEKTIF HADIS. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis.

Nuryani, M. (2020). Kepribadian Dan Profesionalitas Guru dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar Siswa. *Jurnal Dirosah Islamiyah.*

PRATIWI, N. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

Rahadian, F. C., & Amarini, I. (2024). Analisis Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Bawah Mahkamah Agung Ditinjau Dengan Teori Realisme. *Innovative: Journal Of Social Science Research.*

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara.*

Sastrawan, B. (2021). *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Shofa, M. S. (2023). Pengertian Syari’ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari’ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari’ah Samawi. *Fihros Jurnal sejarah dan budaya*.

Solidaritas Hakim indonesia Hentikan Aksi Mogok Massal Minta Naik Gaji, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241013151419-12-1154856/solidaritas-hakim-indonesia-hentikan-aksi-mogok-massal-minta-naik-gaji>

Sugiyono, P. D. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada.

Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum.*

Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum.*

Tantuka, Z. (2024). Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Usman, U., & Azhari, D. S. (2023). Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam. *Journal on Education*.

Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*

1. M Nawal Syarif Al Mahzumy, Pradhita Lalhita Santika, and Talita Abisyta Anaghattha, ‘Mengingatkan Negara: Penyesuaian Kesejahteraan Hakim Merupakan Amanah Konstitusi Indonesia’, *Judex Laguens*, 2.3 (2024), hal. 326–328. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alva Dio Rayfindratama, ‘Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan’, *Birokrasi: Jurnla Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1.2 (2023), hal 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama, ‘Q.S An-Nisa’, Ayat 135 [↑](#footnote-ref-3)
4. Al-Munawi, Faydhul Qadhir, Jilid VI, hal. 238  
    [↑](#footnote-ref-4)
5. Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, ‘Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), hal. 483–484,. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Solidaritas Hakim indonesia Hentikan Aksi Mogok Massal Minta Naik Gaji”, Media Elektronik, CNN Indonesia, 2 Desember 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241013151419-12-1154856/solidaritas-hakim-indonesia-hentikan-aksi-mogok-massal-minta-naik-gaji [↑](#footnote-ref-6)
7. Maulana Shofa, ‘Pengertian Syari’ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari’ah Dan Hukum Perbedaan Antar Syari’ah Samawi’, *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol.7, No. (2023), hal 30. [↑](#footnote-ref-7)
8. Usman Usman and Devi Syukri Azhari, ‘Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam’, *Jurnal on Education*, volume 5 No 2 (2023), hal 174. [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi FItri Sugi Angka and M. Muhajir Sutina, ‘Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Tunjangan, Beban Kerja Terhadap Kinerja ASN’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, Vol. 2 No (2023), hal 198. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudirman and Zainudin Tantuka, ‘Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2024), hal 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-11)
12. Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, ‘Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), hal. 3476. [↑](#footnote-ref-12)
13. Melly Nuryani, "Kepribadian dan Profesionalitas Guru Dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar Siswa", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 1.1 (2020), hal. 95–96. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nursandika, ‘*Hubungan Persepsi Terhadap Gaji Tahunan Dengan Kepuasan Kerja Di PT.Prima Sarana Usaha Mandiri’* (Skripsi, Universitas Medan Area Medan, 2024). [↑](#footnote-ref-14)
15. Lisa Marwah, ‘*Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama Dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penangan Waris Islam di PA Wates* (Skripsi, Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023) . [↑](#footnote-ref-15)
16. Fifit Fitri Lutfianingsi and Jonaedi Efendi, ‘KONSTRUKSI RELASI KESEJAHTERAAN HAKIM DENGAN KUALITAS KINERJA YUDISIAL YANG BERKEADILAN’, *Judex Laguens*, Vol 2, No 3 (2024) [↑](#footnote-ref-16)
17. Adeng Septi Irawan, ‘Menggagas Endowment Fund Bidang Hukum Dan Keadilan: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Dan Martabat Hakim’, *Judex Laugens*, Vol 2, No (2024). [↑](#footnote-ref-17)
18. Putri Shania Azizah Dinnar and others, ‘Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Menegakkan Integritas’, *Judex Laguens*, Vol 2, No3 (2024). [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Ali Ngampo, ‘Hakim Dalam Perspektif Hadis’, *Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol 8, No (2020), hal. 40. [↑](#footnote-ref-19)
20. Herfin Fahri, ‘Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti Dan Relevansinya Dalam Penegakan Keadilan Di Era Modern’, *AL Hikmah : Jurnal Studi Keislaman*, Vol 11, No 1 (2021), hal. 36–37. [↑](#footnote-ref-20)
21. Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, Sign Jurnal Hukum, Vol 1, 2020, hal. 44. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-25)
26. Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah, and Athari Farhani, ‘Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan’, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar;I*, Vol 10, No (2023). [↑](#footnote-ref-26)
27. Christine S.T Kansil and Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, ‘Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Negara’, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, Vol 4, no (2023), hal. 50. [↑](#footnote-ref-27)
28. Yulia Nur Hidayah, *"Pengaruh Tunjangan dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan" (Suatu Penelitian Pada Karyawan Bagian Produksi PT Indorama Synthetics TbK)* (Skripsi Universitas Siliwangi,2021). [↑](#footnote-ref-28)
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung [↑](#footnote-ref-29)
30. “Gaji & Tunjangan Hakim Akhirnya Naik, Segini Besarnya !”, Media Elektronik, CNBC Indonesia, 2 Desember 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20241023063115-4-582227/gaji-tunjangan-hakim-akhirnya-naik-segini-besarannya [↑](#footnote-ref-30)
31. Fakhrabiulza Cesar Rahadian and Ndriati Amarini, ‘Analisis Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Bawah Mahkamah Agung Ditinjau Dengan Teori Realisme’, *Journal Of Social Science Research*, Vol 4, No.6 (2024), hal. 8483. [↑](#footnote-ref-31)
32. Delvina Febriyanti and others, ‘Kesejahteraan Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum’, *Journal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyaratkat*, Vol 3, No (2025), hal 1. [↑](#footnote-ref-32)
33. Daffa Ladro Kusworo and Maghfira Nur Khaliza Fauzi, ‘Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika Dan Kanada’, *Judex Laguens*, 2.2 (2024), hal. 169. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES. and Ineke Dwi Rahma Putri, ‘Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim’, *Judex Laguens*, 2.2 (2024), hal.199. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jilan Sausan and others, ‘Kesejahteraan Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Huku’, *Jurnal Kajian Kontemporer Dan Masyarakat*, Vol 5, No (2025), hal. 6–7, doi:https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/804. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kementrian Agama, ‘Q.S An-Nisa’, ayat 58 [↑](#footnote-ref-36)
37. “Menjadi Profesional Merupakan Fardhu ‘Ain”, Media Elektronik, Suara Muhammadiyah, 20 Januari 2025, https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/05/31/menjadi-profesional-merupakan-fardhu-ain/ [↑](#footnote-ref-37)
38. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 490 [↑](#footnote-ref-38)
39. Novianti Pratiwi, “*Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama”* *(Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya)* (Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang , 2024 [↑](#footnote-ref-39)
40. Rudy Cahya Kurniawan, Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemantapan Media Massa, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober 2022, hal. 375 [↑](#footnote-ref-40)
41. Kriswanto, "Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 5, No (2024), hal. 76–83. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Rijal Fadli, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. N (2021), hal. 34– 35. [↑](#footnote-ref-43)